

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

YOGI LIFA RANDI

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

SKRIPSI

**untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



**YOGI LIFA RANDI
NIM 2010/ 56551**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Nama : Yogi Lifa Randi
BP/NIM : 2010/56551
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

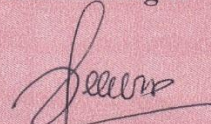
Disetujui oleh :

Pembimbing I



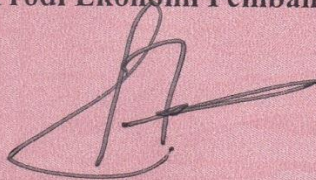
Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP : 19590805 198503 1 006

Pembimbing II



Dewi Zaini Putri, SE., MM
NIP : 19850804 200812 2 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS
NIP : 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

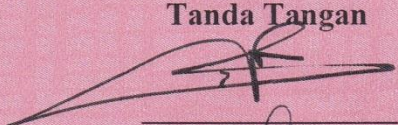
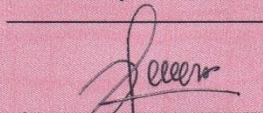
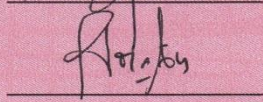
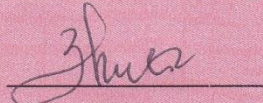
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di depan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Nama : Yogi Lifa Randi
NIM/BP : 56551/2010
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2016

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Drs. Zul Azhar, M.Si	
2.	Sekretaris	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	
3.	Anggota	: Melti Roza Adry, SE, ME	
4.	Anggota	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	

SURAT PERNYATAAN

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Lifa Randi
Nim/ Tahun Masuk : 56551/2010
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 29 Desember 1991
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Patenggangan Komp. Monang Blok C/14 RT 007
RW 003 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara,
Padang Sumatera Barat
No. HP/telp. : 0821-6909-9242
Judul Skripsi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia

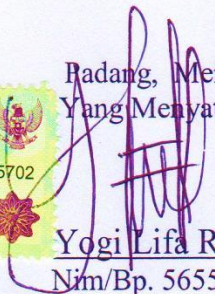
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.



Padang, Mei 2016
Yang Menyatakan


Yogi Lifa Randi
Nim/Bp. 56551/2010

ABSTRAK

Yogi Lifa Randi, (2010/56551): Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Pembimbing 1 Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Pembimbing 2 Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Pendapatan perkapita (PDRB perkapita) terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia; (2) Ketimpangan (Rasio Gini) terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia; dan (3) Kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder dan *pooling* yaitu gabungan data *time series* dan *cross section* dengan periode waktu 2010-2014. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Induktif yang terdiri atas: Analisis data panel, Uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi (R^2), Uji t dan Uji F. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan SAPA (*Strategic Alliance for Poverty Alleviation*) tahun 2010-2014, serta analisis dalam penelitian ini menggunakan *Eviews 7*.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan ($\text{prob} = 0,0000 < \alpha = 0,05$) terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan tingkat pengaruh sebesar 0,000348 (2) Ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan ($\text{prob} = 0,6833 < \alpha = 0,05$) terhadap masyarakat di Indonesia dengan tingkat pengaruh sebesar -2,165350 (3) Kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan ($\text{prob} = 0,0000 < \alpha = 0,05$) terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan tingkat pengaruh sebesar -0.523070 (4) secara bersama-sama Pendapatan perkapita, ketimpangan, dan Kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan ($F_{\text{hitung}} = 124.2594 > F_{\text{tabel}} = 2,66$.) terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat serta Doa demi kelancaran penulisan ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku pembimbing II yang telah menuntun serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si serta para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Alianis, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Ibu Novya Zulva Riani, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan – rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2010 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda Tercinta beserta Kakak dan Adik-adik yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan kesungguhan Do'a dan bantuan Moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	10
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia	16
a. Pendapatan Perkapita	16
b. Ketimpangan	18
c. Kemiskinan Absolut.....	21
3. Temuan Penelitian Sejenis	24
B. Kerangka Konseptual	25
C. Hipotesis.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis Data dan Variabel.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Definisi Operasional.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
1. Analisis Deskriptif	31
2. Analisis Induktif.....	32
a. Model Regresi Data Panel.....	32
b. Estimasi Model Regresi Panel	32
1) <i>Common Effect Model</i>	32
2) <i>Fixed Effect Model</i>	33
3) <i>Random Effect Model</i>	33
c. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel.....	33
1) <i>Uji Chow</i>	33
2) <i>Uji Hausman</i>	34

d. Uji Asumsi Klasik	34
1) Uji AutoKorelasi	34
2) Uji Heteroskedastisitas	35
3) Uji Multikolinearitas	36
e. Koefisien Determinasi (R^2)	37
f. Uji Hipotesis	37
1) Uji t	37
2) Uji F	38
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	40
2. Analisis Deskriptif Variabel	42
3. Analisis Induktif	52
B. Pembahasan	64
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) di Indonesia dari tahun 2010-2014.....	4
Tabel 2 Pendapatan perkapita, ketimpangan dan kemiskinan di indonesia tahun 2010-2014.....	5
Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Indonesia Berdasarkan Proyeksi Penduduk.....	41
Tabel 4.2 Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) Menurut Provinsi di Indonesia (2010-2014).....	44
Tabel 4.3 PDRB perkapita atas harga konstan 2000 di Provinsi di Indonesia (2010-2014) dalam Ribu Rupiah.....	47
Tabel 4.4 Tingkat Rasio Gini di Provinsi di Indonesia (2010-2014).....	49
Tabel 4.5 Jumlah penduduk miskin di Indonesia (2010-2014).....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow Test.....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman.....	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi	55
Tabel 4.10 Hasil Matriks Korelasi.....	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Perkembangan Dimensi IKRaR Tahun 2010-2014.....	4
Gambar 2 Koefisien Gini	19
Gambar 3 Kerangka Konseptual pendapatan perkapita, ketimpangan dan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan perkapita, ketimpangan dan kemiskinan (2010-2014)	75
Lampiran 2	Hasil Uji Regresi	80
Lampiran 3	Hasil Uji Multikoloniaritas.....	82
Lampiran 4	Hasil Uji Autokorelasi.....	83
Lampiran 5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	84
Lampiran 6	Tabel Durbin-Witson, $\alpha = 5\%$	85
Lampiran 7	Tabel t.....	86
Lampiran 8	Tabel f.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemenuhan kesejahteraan sosial telah menjadi perhatian Nasional. Diasumsikan bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan pemerintah tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan dari pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan telah dilakukan oleh beberapa pemimpin pemerintahan sejak pasca kemerdekaan tahun 1945. Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali pemerintahan berganti, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu konsep dengan multi-indikator yang menunjukkan ukuran keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebagai sebuah konsep, pengukuran kesejahteraan masyarakat mengalami berbagai

perkembangan. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi social ekonominya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna dari pembukaan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dijamin oleh Negara. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkannya pemerintah membuat kebijakan agar masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakatnya, dengan cara mewajibkan semua penduduk usia sekolah mau menamatkan pendidikan selama 9 tahun atau sampai dengan Sekolah Menengah Pertama. Sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional No2/1989. Pemerintah

berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga Negara Indonesia yang berumur 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD, dan 3 tahun di SLTP secara merata. Memberikan asuransi kesehatan bagi semua penduduk, dan juga memberikan bantuan-bantuan sosial baik secara langsung seperti, Bantuan Langsung Tunai(BLT),ataupun secara tidak langsung seperti memberikan subsidi kepada barang-barang pokok agar semua keluarga atau masyarakat secara keseluruhan dapat hidup sejahtera baik itu kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Konstitusi Negara menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi penuh dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam mendorong peningkatan daya saing daerah berbasiskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, keistimewaan dan kekhususan setiap daerah. Itu artinya, pemerintah daerah merupakan jantung dalam menciptakan dan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Didalam kesejahteraan masyarakat ini adalah bahwa yang terpenting bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang harus capai, tetapi apakah pertumbuhan yang diciptakan inklusif (*inclusive growth*), sehingga berdampak pada meingkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Melalui Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR) kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesempatan kerja dan berusaha dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat khususnya masyarakat miskin, terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat

secara berkelanjutan sehingga terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat, dan berjalannya keseluruhan proses demokrasi baik secara prosedural dan substansial oleh tata kelola pemerintah yang baik dan benar. Demikian juga di bidang politik, hukum dan HAM, melalui IKraR kita ingin memberikan pesan kebijakan bahwa pendekatan keamanan harus lebih melindungi dan menjamin adanya rasa aman bagi kehidupan secara adil dan tanpa diskriminasi.

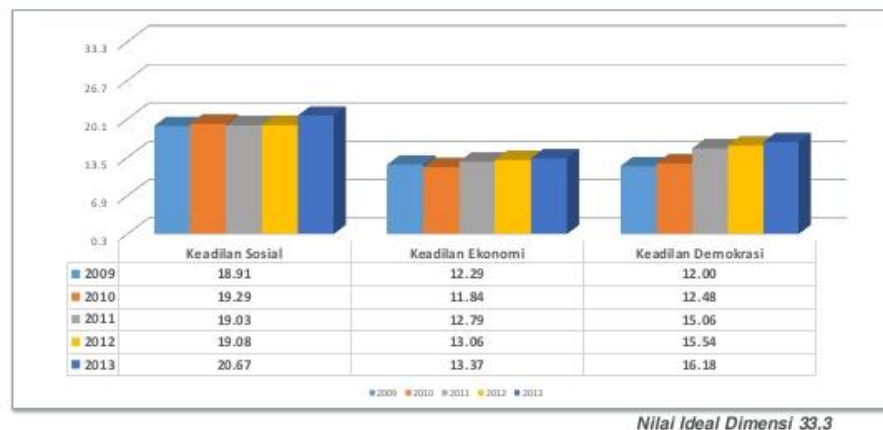
Tabel 1
Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) Tahun 2010-2014

	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Indonesia	49,98	50,70	51,96	52,96	54,16

Sumber: SAPA Indonesia 2010-2014

Bedasarkan tabel 1, IkraR Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014 selalu mengalami peningkatan dari 49,98 ke 54,16, tetapi peningkatan ini tidak terlalu signifikan dan angka ini masih tergolong rendah jika dilihat dari nilai IKraR yaitu dibawah ≤ 50 . Terdapat 3 dimensi indicator didalam indeks kesejahteraan rakyat yaitu keadilan social, keadilan ekonomi dan dimensi keadilan demokrasi dan governance.

Gambar 1
Perkembangan Dimensi IKraR Tahun 2010 - 2014



Berdasarkan gambar diatas, ketiga dimensi tersebut melambangkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dimensi keadilan social mempunyai tingkatan yg lebih baik daripada dimensi keadilan ekonomi dan demokrasi. Namun jika dilihat dari nilai ideal dimensi yaitu 33.3, ketiga dimensi kesejahteraan tersebut masih rendah. Dimensi yang paling rendah adalah dimensi ekonomi, memang fakta tingkat perekonomian Indonesia masih rendah daripada sisi social masyarakat Indonesia sendiri. Laporan MDGs (UNDP, Bappenas 2010) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang tinggi, pendapatan perkapita yang rendah, dan ketimpangan yang terjadi merupakan salah satu faktor penting menjadi menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di indonesia

Tabel 2
Tingkat Pendapatan perkapita, Ketimpangan, dan Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB perkapita Menurut Harga Konstan (Ribu Rupiah)	Gini Ratio	Tingkat Kemiskinan (%)
2010	28.778,17	0,36	14,43
2011	30.112,37	0,38	13,21
2012	31.519,93	0,38	12,29
2013	32.874,76	0,38	12,20
2014	34.127.72	0,38	11,69

Sumber: BPS-RI 2010-2014

Data statistik PDRB per kapita berdasarkan harga konstan karena perhitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengukur perubahan volume produksi dan perkembangan produktivitas secara nyata karena faktor pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga dapat digunakan sebagai factor yang mempengaruhi indeks

kesejahteraan rakyat (IKraR)Indonesia, sehingga menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran suatu daerah dari tahun ke tahun dan sebagai dasar perencanaan atau proyeksi pembangunan pada masa mendatang.

PDRB Perkapita Indonesia dari tahun 2010 ke tahun 2014 selalu naik karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut seperti kekayaan yang berupa sumber-sumber ekonomi (kekayaan alam), jumlah penduduk dan kemampuan penduduk (SDM) dalam menerapkan teknik produksi atau mengolah kekayaan yang dimiliki daerahnya. Dari data PDRB per kapita yang selalu positif tersebut diikuti dengan positifnya indeks kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, masyarakat lebih mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan sehari-harinya, kepuasan individu dan meningkatkan perekonomian didalam keluarganya sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).Tingkat pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini -nya adalah sama dengan nol ($\text{Gini Ratio} = 0$). Jadi singkatnya rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1.dan jika mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Ketimpangan akan terjadi jika angka gini rasio terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relative rendah ketimpangan bila angka gini rasio terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Berdasarkan tabel 2 tingkat ketimpangan Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014 termasuk kategori relatif merata diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang selalu mengalami peningkatan jika dilihat dari data ketimpangan. Dari hal tersebut terdapat efek untuk kemiskinan, berdasarkan dari jumlah penduduk yang miskin dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka. Namun dari data kemiskinan yang menunjukkan tren positif tersebut diikuti dengan data IKRaR dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas dimana tingkat pendapatan perkapita yang selalu melihat tren positif dari tahun ketahun dan ketimpangan yang menunjukkan angka yang tidak terlalu besar dalam pemeratan distribusi pendapatan antar wilayah indonesia serta jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin berkurang. Dari ketiga variabel yang menunjukkan tren positif yang tak lepas dari meningkatnya perekonomian indonesia dari tahun ke tahun, dan diikuti dengan tingkat kesejahteraan tetapi peningkatan IkraR tidak terlalu signifikan yang semakin meningkat. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah proposal penelitian untuk skripsi dengan judul: “ **Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Sejauhmana pendapatan perkapita mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
2. Sejaumana ketimpangan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
3. Sejauhmana kemiskinan absolut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
4. Secara bersama-sama, sejauhmana pendapatan perkapita, ketimpangan dan kemiskinan absolut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
2. Pengaruh ketimpangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
3. Pengaruh kemiskinan absolut terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
4. Secara bersama-sama pengaruh pendapatan perkapita, ketimpangan dan kemiskinan absolut terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang analisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik untuk ke depannya.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi riset yang akan datang di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi pengetahuan. Di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi mikro.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk membantu membuat kebijakan dalam menghadapi masalah kemiskinan, investasi, dan jumlah penduduk di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan sosial termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 34 tentang kepedulian Negara pada kelompok lemah, menempatkan Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suus, 2006). Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menurut Suparlan dalam Suus (2006:5), kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Menurut Friendlander dalam Suus (Suud:8), kesejahteraan sosial merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Sedangkan definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut Durnah dalam Suus (2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial

melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan sosial kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatu-satuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Todaro (2003:235) mengemukakan bahwa peningkatan pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas), seperti tuan tanah, politisi, pimpinan perusahaan, dan kaum elit lainnya akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal, berpergian ke luar negeri, dan atau menyimpan kekayaannya di luar negeri dalam bentuk pelarian modal (*capital flight*). Sementara golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Peningkatan pendapatan ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian (Todaro, 2003:252)

Todaro (2006:250) ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan

yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Todaro (2006:250), kesejahteraan dispesifikan dan disederhanakan menjadi fungsi kesejahteraan W (*welfare*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = W(Y, I, P)$$

Keterangan:

Y = pendapatan perkapita

I = ketimpangan

P = Kemiskinan absolut

Dimana Y adalah pendapatan perkapita, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variable ini mempunyai signifikansi yang berbeda-beda, dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di negara-negara berkembang.

Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan di atas, diasumsikan bahwa kesejahteraan social berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi pendapatan perkapita seseorang maka dalam mengenyam pendidikan akan semakin tinggi karena dalam upaya pemenuhan pendidikan yang begitu mudah dicapai oleh seseorang jika pendapatan yang cukup atau lebih. Tetapi dalam masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas. Tidak ada masyarakat beradap yang merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan senegarannya berada dalam kesengsaraan absolut karena kemiskinan yang dideritanya. Mungkin karena alasan itulah setiap agama besar, selalu menekankan

pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan, dan juga merupakan salah satu alasan mengapa bantuan pembangunan internasional didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis.

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan dimasyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Disimpulkan bahwa pengertian ukuran kesejahteraan awalnya hanya diukur melalui aspek fisik dan *income* saja, namun berkembangnya zaman saat ini kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator-indikator seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya.

Didalam Buku IKRaR atau Indeks Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan merupakan konsep yang dapat dilihat dari banyak cara pandang, dan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Berbagai definisi kesejahteraan dari berbagai cara pandang telah dihasilkan oleh para pakar. Ada yang melihat hanya dari satu sudut pandang sosial, ekonomi, atau pun politik. Sebagian besar ahli melihat kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi. Tetapi seiring dengan perkembangan jaman, kesejahteraan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Berbagai perkembangan terkini dan juga berbagai kajian menampakkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti bahwa rakyat negara

tersebut sejahtera. Berangkat dari perkembangan terkini di dunia tentang kesejahteraan, maka ukuran yang dipakai adalah IKRaR yaitu merumuskan batasan kesejahteraan yang akan digunakan. Dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan juga konteks ke-Indonesiaan, maka cara pandang kesejahteraan yang digunakan dalam IKRaR dilihat dari dua sudut pandang, yakni: secara sektoral dan secara utuh.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan secara sektoral adalah terpenuhinya hak dasar oleh orang per orang (individu), bukan oleh komunitas atau oleh negara. Misalnya, terpenuhinya hak atas pangan, sandang. Dengan kata lain, jika individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka ia dapat dikatakan sejahtera. Sedangkan kesejahteraan secara utuh adalah pemenuhan hak dasar oleh komunitas atau negara, dan tidak bisa hanya oleh orang per orang. Misalnya, terpenuhinya hak atas air bersih (air bersih harus disediakan oleh negara). Dengan kata lain, jika negara atau komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya (yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh mereka), maka warga negara di negara tersebut dapat dikatakan sejahtera.

Selain itu, kesejahteraan juga dipandang dari rentang waktu. Berdasarkan rentang waktu, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, yakni: saat ini. Melihat kesejahteraan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kualitas hidup, dan masa depan. Kesejahteraan dilihat sebagai tujuan akhir, yaitu hidup yang bermartabat dan berdaulat.

Seiring dengan upaya pemerintah dalam pencapaian target MDGs, upaya kerjasama berbagai pemangku kepentingan juga melihat bahwa diperlukan suatu

pengukuran untuk dapat melihat dan memastikan proses yang dilakukan saat ini mengarah pada pencapaian target yang disepakati dengan melahirkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR). IKRaR merupakan suatu alat pengukuran yang dikembangkan untuk melihat relasi antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, serta demokrasi dan governance. Indeks kesejahteraan rakyat bernilai antara 0-100, dimana semakin tinggi nilai indeks semakin baik kondisi indeks kesejahteraan rakyat tersebut. (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

a) Pendapatan perkapita

Todaro (2003:18) menyebutkan bahwa pendapatan per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu negara, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Pendapatan per kapita (Y_{capita}) dapat dihitung dengan:

$$Y_{capita} = \frac{PDRB}{Jumlah\ Penduduk}$$

Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga

dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004). Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB Perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel di atas.

Kenaikan pendapatan per kapita yang dapat dicapai menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pendapatan per kapita mencerminkan daya beli masyarakat. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita masyarakat, maka daya beli masyarakat meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat berarti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan meningkat. Peningkatan yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia (Arsyad, 2004).

Dengan demikian masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan dalam segala macam bentuk rintangan pendidikan seperti biaya untuk sekolah dan transportasi. Dari segi social, masyarakat menyadari pendidikan adalah kebutuhan hidup yang sangat penting agar menjadikan masyarakat yang cerdas dan sejahtera untuk kedepannya. Dari segi ekonomi, pendidikan yang tinggi akan menaikkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi serta

menjadikan pendidikan sebagai investasi pendidikan jangka panjang untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

b) Ketimpangan

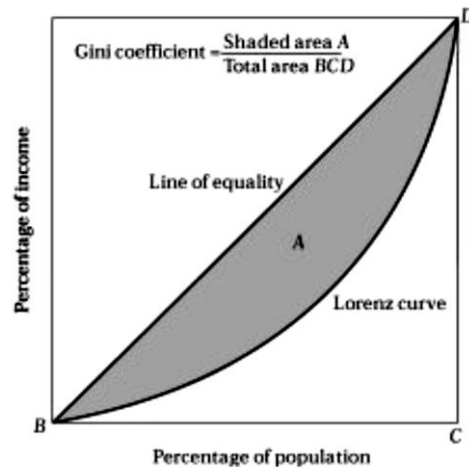
Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Alat ukur atau media yang sangat mudah digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan relatif disuatu negara adalah dengan menghitung rasio yang terletak diantara garis diagonal dari Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz itu berada. Dalam gambar 1, rasio ini adalah rasio daerah A yang diarsir dibagi dengan luas segitiga BCD. Rasio ini dikenal dengan Koefisien Gini (*Gini Coefficient*) yang diambil dari nama ahli statistik Italia yang

bernama C. Gini yang merumuskan pertama kali pada tahun 1912 (Todaro dan Smith, 2004:226).

Gambar 2. Koefisien Gini



Sumber : www.knowledgerush.com/wiki_image

Dari gambar di atas, sumbu horisontal menggambarkan prosentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing prosentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut “garis pemerataan sempurna”. Karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir

Koefisien gini juga dapat dihitung dengan menggunakan matematik. Rumus koefisien gini sebagai berikut (Arsyad, 1999:232).

$$KG = 1 - \sum_{n=1}^n (X_{1+i} - X_1)(Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana:

- KG = Angka koefisien gini
- X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i
- F_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i
- Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i
- Kelas i = Jika dibagi menjadi lima kelas: 20% miskin, 20% kedua, 20% ketiga, 20% keempat dan 20% terkaya. Jika dibagi menjadi tiga kelas: 40% miskin, 40% menengah, 20% kaya.

Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna), hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya Koefisien Gini untuk negara - negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, ketimpangan sedang berkisar antara 0,36 hingga 0,49 sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro dan Smith, 2004:226).

Ketimpangan yang tinggi di suatu negara membuat suatu wilayah di Indonesia tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik daripada wilayah yang memiliki sistem pendidikan yang baik. Dikarenakan pendistribusian pendapatan maupun distribusi pendidikan yang dilakukan pemerintah tidak merata yang menyebabkan sebagian masyarakat (wilayah terpencil) tidak mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik tersebut biasanya terjadi pada masyarakat desa karena akses untuk mendapatkan pendidikan seperti sarana dan prasarana untuk mengenyam pendidikan lebih sulit daripada wilayah perkotaan yang lebih mudah dijangkau oleh pemerintah.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi setiap wilayah Indonesia membuat pendidikan yang diprogramkan pemerintah tidak selalu sampai kepada masyarakat yang tergolong pendapatan yang rendah yang menyebabkan kurang mampunya masyarakat tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi ketimpangan tersebut ialah dengan mengadakan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu, menyediakan dana BOS untuk masyarakat. Dari segala hal yang terjadi dan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah semuanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik ke depannya.

c) Kemiskinan Absolut

Menurut Tambunan (2000) dalam Buku Perencanaan Pembangunan, Tri Widodo (1999:2011) kemiskinan absolut adalah dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen bukan makanan yang juga diperlukan untuk *survive*. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan ekstrim, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interpretasi setempat atau kalkulasi. Pendekatan yang digunakan umumnya berbeda-beda dan *poverty line* yang digunakan juga beragam antara studi-studi tersebut sehingga hasil atau gambar mengenai kemiskinan di dalam negeri juga berbeda-beda. Dalam kasus Indonesia, BPS dengan kajian tersendiri menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan

digunakan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara perkotaan dan perdesaan.

Menurut Tri Widodo (298:2011). Pada umumnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Masalah utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan, iklim dan berbagai factor ekonomi lain. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali factor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Masing-masing keluarga berbeda latar belakang ekonominya. Ada keluarga yang latar belakang sosial ekonominya memadai, sehingga menyediakan fasilitas pendidikan juga memadai. Sebaliknya ada pula keluarga yang sosial ekonominya sangat rendah, sehingga tidak dapat memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, bahkan sekolah pun tidak. Rendahnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat cukup besar dan merata hal ini menjadi semakin parah sejak tahun 1998 ketika krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah, harga barang naik semakin tinggi sehingga daya beli masyarakat sangat kurang.

Biaya sekolah terbagi atas dua yaitu biaya sekolah langsung dan biaya sekolah tidak langsung. Biaya sekolah langsung seperti pembayaran uang pembangunan. Biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, beli seragam dan biaya lainnya. Biaya sekolah tidak langsung yang tinggi merupakan halangan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan pendidikan formal, sehingga mereka mengambil keputusan untuk berhenti untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Meskipun kemiskinan menurut konsep ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemiskinan juga dapat diidentifikasi dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku penduduk yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat dirubah, rendahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya

manusia, rendahnya produktifitas, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Todaro, 2000: 31).

B. Temuan Penelitian Sejenis

Penelitian yang dilakukan oleh Astrina Widyastuti (2009) menyatakan bahwa produktivitas pekerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa ada hubungan antara produktivitas seorang pekerja dengan kesejahteraan keluarga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Peningkatan produktivitas dapat menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup pekerja melalui pendapatan. Pendidikan mempunyai pengaruh negatif namun signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan seseorang terhadap kesejahteraan keluarga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009, walaupun nilainya negatif karena penelitian ini bersifat jangka pendek. Semakin tinggi pendidikan, maka biaya yang dibutuhkan semakin tinggi karena dapat mengurangi pendapatan keluarga, namun dalam jangka panjang pendidikan akan mendatangkan manfaat yang lebih besar.

Menurut penelitian Hartoyo menyatakan bahwa Keluarga yang menjadi contoh penelitian ini merupakan keluarga muda dengan anggota keluarga lima orang. Pendidikan Kepala Keluarga dan istri relatif rendah, dengan rata-rata lama pendidikan 7,5 tahun untuk suami dan 6,8 tahun untuk istri. Perbedaan karakteristik demografi (usia dan jumlah anggota keluarga) dan pendidikan Kepala Keluarga dan istri tidak signifikan antara kelompok keluarga pembudidaya

ikan dan kelompok keluarga nonpembudidaya. Pada kelompok pembudidaya ikan, Kepala Keluarga lebih banyak memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utamanya sebagai pembudidaya ikan. Pendapatan dan pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok pembudidaya ikan cenderung lebih tinggi dibanding dengan kelompok nonpembudidaya ikan.

Sedangkan menurut Elmanora (2012) menyatakan bahwa Keluarga petani kayu manis di Desa Tamiai, Kerinci, Jambi memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator *a simple poverty scorecard for Indonesia* berhubungan signifikan dengan kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator BPS dan BKKBN. Kesejahteraan keluarga petani kayu manis dipengaruhi oleh besar keluarga, usia ayah, dan pendapatan keluarga per bulan. Besar keluarga berpengaruh signifikan negative terhadap kesejahteraan keluarga baik berdasarkan indikator BPS, BKKBN, maupun *a simple poverty scorecard for Indonesia*. Pendapatan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator BKKBN dan *a simple poverty scorecard for Indonesia*. Kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator BKKBN juga dipengaruhi secara signifikan negatif oleh usiaayah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan pada kajian teori di atas.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas dimana variabel bebas adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pengeluaran per kapita. Sedangkan sebagai variabel terikat yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat.

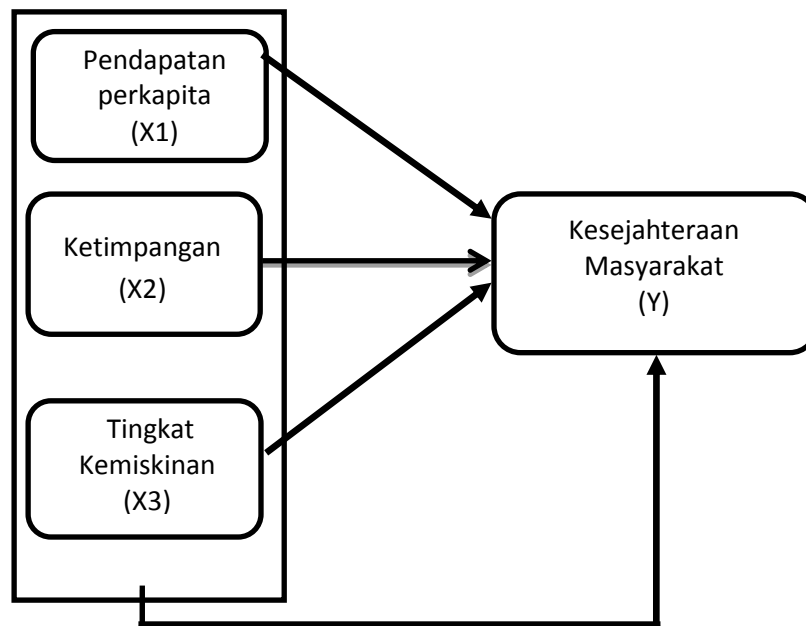
Pengaruh pendapatan perkapita (X_1) terhadap (Y) adalah semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan, dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan perkapita maka semakin rendah kesejahteraan suatu negara hal ini di mungkinkan karena pendapatan perkapita menyokong secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh ketimpangan (X_2) terhadap (Y) adalah semakin tinggi tingkat ketimpangan maka akan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya semakin rendah tingkat ketimpangan, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal ini di mungkinkan karena jika pemerataan ekonomi di tingkatkan maka akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pengaruh tingkat kemiskinan (X_3) terhadap (Y) adalah semakin besar kemiskinan maka akan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara, dan sebaliknya semakin rendah kemiskinan maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu negara, karena kemiskinan merupakan faktor dari kesejahteraan masyarakat.

Jadi, secara bersama-sama pendapatan perkapita (X_1), ketimpangan (X_2) dan kemiskinan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Y).

Berikut ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 3

Kerangka konseptual pendapatan perkapita, ketimpangan dan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia

Gambar di atas adalah bagaimana hubungan pendapatan perkapita, ketimpangan dan, kemiskinan mempunyai pengaruh yang saling berkaitan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

D. Hipotesis

Dari kerangka konseptual di atas maka dapat dikemukakan suatu hipotesis dalam penulisan ini yaitu:

1. Pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Ketimpangan mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

3. Tingkat Kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

4. Pendapatan perkapita, ketimpangan, dan kemiskinan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi parsial } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas Pendapatan perkapita, ketimpangan, dan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa Pendapatan perkapita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
2. Ketimpangan berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dimana semakin tinggi ketimpangan maka akan menurunkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
3. Kemiskinan absolut berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dimana semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan menurunkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
4. Pendapatan perkapita, ketimpangan, dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai F hitung adalah 124,2594, berarti $F_{hitung} = 124,2594 > F_{table} = 2,66$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian yang di peroleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dapat dijelaskan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan perkapita juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hendaknyapemerintah dan instansi terkait lebih aktif untuk mendorong rakyatnya untuk meningkatkan usaha masyarakat, salah satu langkahnya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di Indonesia.
2. Dalam keadaan kemiskinan yang terjadi saat ini, diharapkan pemerintah untuk bisa lebih cermat dalam mengalokasikan bantuan rakyat agar tepat sasaran dan menunjang semua kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya akan meningkatkan perekonomian rakyat itu sendiri dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Di dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat, pmerintah masih kurang mengembangkan nilai-nilai lokal/daerah, hanya melihat dari sisi universal/makro. Dengan memperhatikan keunggulan dan kekurangan masing-masing daerah akan diketahui daerah mana saja yang mengalami perbedaan yang signifikan terhadap daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen, 2012. *Statistika 1 (Teori dan Aplikasi)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2012.
- BPS. 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : BPS.
- Edi Suharto. 2004 Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta.
- Elmanora, 2012. *Kesejahteraan Keluarga Petani Kayu Manis*. Jurnal, Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB Bogor 2012.
- Hartoyo, Aniri N.B, 2010, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pembudidaya Ikan Dan Non Pembudidaya Ikan Di Kabupaten Bogor*, Jurnal. Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB Bogor 2010.
- Husodo, Siswono Yudo. 2009. Menuju Welfare State. Jakarta: Baris Baru.
- Iskandar, 2007. *Analisis Praktik Manajemen Sumberdaya Keluarga dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten dan Kota Bogor*, Jurnal. Pasca Sarjana IPB Departemen IKK Fakultas Ekologi Manusia IPB 2012.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan. Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Retningtyas, Weni Alinda. 2012. *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*. Jurnal, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012.
- SAPA. 2013. *Indeks Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta : SAPA.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal, Pontianak : Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.